

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN <i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xi

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	7
	E. Kerangka Konseptual	7
	F. Kerangka Teoritis.....	8
	G. Metode Penelitian	15
	H. Sistematika Penulisan	24
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	24
	A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	28
	1. Pengertian.Tindak Pidana.....	30
	2. Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya.....	30
	3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana.....	30
	4. Pertanggungjawaban Pidana.....	30
	B. Tinjauan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	35
	Korupsi.....	39
	1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	43
	C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Badan	34
	Penanggulangan Bencana Daerah.....	49
	1. Pengertian Lembaga Badan Penanggulangan	49
	Bencana Daerah.....	
	2. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007	

	dan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang	49
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	
D.	Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	
	1. Teori Absolut/Retributif.....	54
	2. Teori Tujuan/Relatif.....	
	3. Teori Gabungan/Verenigings Theorien.....	54
	4. Teori Rehabilitasi.....	
E.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam	
	Rancangan Hukum Pidana 2018.....	
	1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam	61
	Rancangan Hukum Pidana 2018.....	64
F.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam	
	Pesepektif Islam.....	64
	1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam	65
	Pesepektif Islam.....	67
	2. Pengertian Pencurian Dalam Pidana Islam.....	
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A.	Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi	
	di Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Kabupaten Kudus.....	70
B.	Upaya Penegak hukum dalam memberantas tindak	
	pidana korupsi di Lembaga Badan Penanggulangan	
		70

Bencana	Daerah	Kabupaten	
Kudus.....			73
C. Kebijakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan			
tindak pidana korupsi dalam rangka pembaharuan			
hukum pidana di Indonesia.....			73
PENUTUP			
A. Simpulan			78
B. Saran			79

BAB IV